

SKRIPSI

**KINERJA KELOMPOK TANI HUTAN UJUNG DALAM
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DI
DESA ARASOE KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ASTRIANI TAHIR

M011201220



PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

KINERJA KELOMPOK TANI HUTAN UJUNG DALAM PENGELOLAAN
HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DI DESA ARASOE, KECAMATAN
CINA, KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh

ASTRIANI TAHIR

M011 20 1220

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

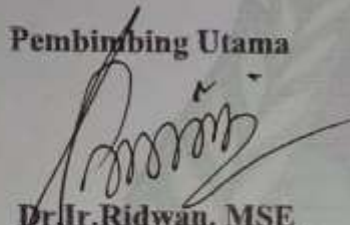
Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 08 Mei 2024

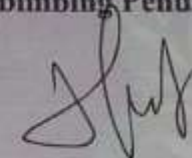
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing Utama

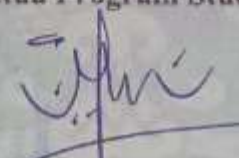

Dr. Ir. Ridwan, MSE
NIP. 19680112199403 1 001

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Forest. Muhammad alif K.S., S.Hut.M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P
NIP.19680410199512 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astriani Tahir
Nim : M011201220
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Kinerja Kelompok Tani Hutan Ujung dalam Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan (HKm) di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Mei 2024



Astriani Tahir

ABSTRAK

ASTRIANI TAHIR (M011201220). Kinerja Kelompok Tani Hutan Ujung dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone.

Keberadaan HKm memberikan akses masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari dan mengkaji persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di lingkup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dan indikator yang mempengaruhi kinerja kelompok tani dalam pengelolaan HKm dan mengidentifikasi kinerja kelompok tani dalam pengelolaan HKm. Data diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi kinerja kelompok tani dalam pengelolaan hutan adalah keberadaan kelompok tani, aturan kelompok, rencana kerja kelompok, keanggotaan kelompok, dan areal kelola kelompok. Variabel yang paling mempengaruhi kinerja dalam proses pengelolaan hutan adalah penyiapan lahan, proses pembibitan dan proses penanaman. Kinerja Kelompok Tani Hutan Ujung terjadi peningkatan kinerja kelompok tani dari 0% sebelum penetapan areal menjadi 67% sesudah penetapan dengan kategori berkinerja tinggi. Sementara itu, terjadi peningkatan kinerja kelompok tani dalam proses pengelolaan hutan dari 51,40% sebelum penetapan menjadi 69,95% sesudah penetapan areal HKm dengan kategori berkinerja tinggi.

Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kinerja, Kelompok Tani Hutan (KTH)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas rahmat, berkah serta izin-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kinerja Kelompok Tani Hutan Ujung dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone”** guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akan sangat sulit untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih terkhusus yang sedalam dalamnya kepada ibunda tercinta **St. Fatimah** yang selalu menyayangi, memberikan dukungan, mendoakan penulis agar selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap langkahnya, serta menasehati penulis agar menyelesaikan kewajiban ini. Skripsi ini penulis juga persembahkan kepada Ayahanda **Muhammad Tahir** yang telah mengantar dan menemani penulis dalam proses penelitian serta mengorbankan waktu dan tenaganya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya. Terimakasih atas doa,cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kedua Orang Tua yang sangat hebat ini. Ucapan terima kasih juga kepada kakak tercinta **Helnida Adriani Tahir** dan **Sari Andira Tahir** yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada penulis agar mampu menyelesaikan skripsi. Ucapan terima kasih kepada adik tersayang **Nurwafiah Tahir** yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Dr. Ir. Ridwan, M.S.E.** dan Bapak **Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif K.S. S.Hut. M.Si.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut, M.P.** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si.** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan serta pengembangan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu **Dosen Pengajar dan Staf Pegawai Fakultas Kehutanan Unhas,** yang telah membantu dan memudahkan penulis selama menuntut ilmu serta dalam pengurusan administrasi penulis selama menempuh Pendidikan
4. **Masyarakat Desa Arasoe** terkhusus Bapak **H. Andi Syarifuddin, A. Ma** dan Bapak **Asriawan** yang sangat membantu penulis dalam melakukan pengambilan data.
5. Teman-teman "**Pemanenan Menyerang**" **Ananda Agil D.Ritonga, S.Hut., Mutiara Ananda Praja, S.Hut., Ririn Dwi Haryanti, S.Hut** dan **Adinda Maylena** yang selalu menjadi pendengar cerpen penulis setiap harinya dan menghibur selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman Circle **St.Farastuty H.Munir, S.M., Tzurkiah Nur Amalia** dan **Shafa Nurul Rochimah Dwi Razul. S.P.** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
7. Teman-teman Reveurs **Gusni Wirianti, Mufliha Hasanuddin, Meydinatul Husna, Khaeratun Hisan, Lilis Nur Afriani** dan **Musfirah Mustamiada, S.Kel.** yang selalu menguatkan selama perjalanan penulisan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan **Warda Wiyana Habir** yang sudah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan laporan praktikum dan tugas selama masa perkuliahan.
9. Keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** dan terkhusus **Sobat Sosial** yang telah membersamai selama proses perkuliahan.
10. Keluarga besar **IMPERIUM** dan Kelas **Kehutanan E** yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama proses menimba ilmu perkuliahan.
11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati segala tantangan sehingga mampu berhasil berada di titik ini. Penulis menyadari bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk memulai

kehidupan yang lebih baik sesuai yang diimpikan. Terima kasih banyak sudah bertahan sejauh ini. semangat terus dan bahagia selalu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 8 Mei 2024

Astriani Tahir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Kegunaan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Hutan Kemasyarakatan (HKm).....	4
2.2 Kelompok Tani Hutan (KTH)	5
2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dalam Pengelolaan HKm.....	6
III. METODOLOGI PENELITIAN	10
3.1 Waktu dan Tempat.....	10
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	10
3.2.1 Alat	10
3.2.2 Bahan.....	10
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	10
3.4 Populasi dan Sampel.....	11

3.5 Sumber Data	12
3.6 Analisis Data.....	12
3.6.1 Analisis kuantitatif	12
3.6.2 Analisis kualitatif	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1 Kondisi Umum Lokasi	14
4.1.1 Peta Lokasi Penelitian	14
4.1.2 Aksesibilitas	15
4.1.3 Kondisi Vegetasi	15
4.2 Karakteristik Responden	15
4.3 Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Arasoe.....	15
4.4 Sejarah pengelolaan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)	16
4.5 Kinerja Kelompok Tani dalam Pengelolaan HKm.....	17
4.5.1 Kelompok.....	17
4.5.2 Struktur Kelompok.....	19
4.5.3 Peraturan Kelompok.....	20
4.5.4 Rencana Kerja Kelompok	21
4.5.5 Keanggotaan Kelompok.....	22
4.5.6 Areal Kelola	23
4.6 Total Kinerja Kelompok Tani dalam Pengelolaan HKm.....	24
4.7 Kinerja Kelompok Tani dalam Proses Pengelolaan HKm	24
4.7.1 Penyiapan Lahan	25
4.7.2 Pengadaan dan Proses Pembibitan	26
4.7.3 Proses Penanaman	27
4.7.4 Sistem Pemeliharaan	28

4.8 Total Kinerja Kelompok Tani dalam Proses Pengelolaan Hutan	29
V. PENUTUP	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Desa Arasoe	14
Gambar 2. Grafik kinerja kelompok tani sebelum dan sesudah penetapan HKm 17	
Gambar 3. Grafik Total Kinerja Kelompok Tani Hutan Sebelum dan Sesudah Penetapan Areal HKm.....	24
Gambar 4. Grafik Kinerja Kelompok Tani Dalam Proses Pengelolaan Hutan Sebelum dan Sesudah Penetapan Areal HKm	25
Gambar 5. Grafik Total Kinerja Kelompok Tani dalam Proses Pengelolaan Hutan	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kondisi Vegetasi Areal Izin Kelompok Tani Hutan Ujung	15
Tabel 2. Klasifikasi responden berdasarkan umur	15
Tabel 3. Nama Pengurus Kelompok Tani Ujung	16
Tabel 4. Pembahasan-pembahasan dalam setiap pertemuan.....	19
Tabel 5. Kuesioner Kinerja Sebelum Penetapan Kebijakan HKm.....	43
Tabel 6. Kuesioner Kinerja Setelah Penetapan Kebijakan HKm	44
Tabel 7. Kuesioner Pengelolaan Hutan Sebelum Penetapan Kebijakan HKm	46
Tabel 8. Kuesioner Pengelolaan Hutan setelah Penetapan Kebijakan HKm	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	35
Lampiran 2. Kuesioner Sebelum dan Sesudah Penetapan Areal HKm.....	43
Lampiran 3. Data Olahan Kinerja Kelompok Tani	48
Lampiran 4. Identitas Responden.....	51
Lampiran 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan KUPS	55
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian	56

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Program perhutanan sosial telah menjadi salah satu kebijakan strategis di bidang kehutanan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya mengatasi kemiskinan melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat sekitar hutan. Masyarakat yang telah memegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial diberikan hak untuk mengelola areal sesuai izin yang didapatkan agar meningkatkan taraf ekonominya serta memperhatikan alur perhutanan sosial khususnya usaha kelompok (Tampubolon et al., 2021).

Perhutanan sosial terdapat beberapa jenis skema salah satunya adalah skema hutan kemasyarakatan atau biasa disingkat HKm (Pambudi, 2023). HKm merupakan hutan negara yang diutamakan untuk pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat setempat yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat sehingga mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil (Sagita et al., 2019). Kegiatan penilaian kinerja kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan kinerja dari KTH dalam realisasi pelaksanaan pengelolaan hutan (Astriyani, 2023). Berdasarkan realisasi capaian perhutanan sosial di Indonesia dalam skema HKm, luas keseluruhan sekitar 916.414,60 Ha (Ditjen PSKL, 2022). Besarnya capaian perhutanan sosial dalam skema HKm menunjukkan bahwa kinerja kelompok tani hutan memiliki peranan penting dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan hutan yang baik oleh KTH akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal. Menurut Akhdiyati & Riyani (2009) untuk mencapai kesejahteraan maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan

kinerja kelompok tani. Dalam upaya yang dilakukan oleh KTH tentu dihadapkan dengan berbagai masalah terlebih pada kelompok tani pemula. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam KTH yaitu rencana kerja yang tidak jelas, administrasi kelompok yang tidak lengkap dan pembinaan yang tidak optimal. Sementara itu, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok tani hutan mitra UPT KPHP Minas Tahura melalui uji yang dilakukan memperoleh tiga faktor yang mempengaruhinya diantaranya kedinamisan kelompok, partisipasi anggota dan karakteristik ketua kelompok (Gustika et al., 2020).

Penelitian ini berfokus di Kabupaten Bone. Secara khusus di wilayah Kabupaten Bone, luas lahan kawasan hutan yang dimiliki 6,885 Ha dan diterima sebanyak 2.695 kepala keluarga (KPH Cenrana, 2023). Dengan luasan HKm yang ada dan dikelola oleh masyarakat di Kabupaten Bone, seharusnya menjadikan kabupaten ini menjadi lebih maju dari segi pendapatannya. Keberadaan KTH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan sesuai tujuan program perhutanan sosial. Salah satu KTH kelas pemula di Kabupaten Bone adalah KTH Ujung di Kecamatan Cina yang memiliki luas lahan 96 Ha. KTH Ujung dibentuk tahun 2019 sesuai dengan Sk.665/Menlhk-Pskl/Pkps/Psl.0/7/2019 (KPH Cenrana, 2023). Penilaian kinerja dilakukan bukan untuk mencari kesalahan dari pihak pengelola namun sebagai upaya untuk menemukan cara agar pengelolaan hutan terlaksana secara lestari. Kinerja KTH pun diperlukan adanya evaluasi agar fungsi dan tujuan HKm dapat terealisasi seperti yang diharapkan. Begitu Pula yang terjadi di KTH Ujung. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh kinerja KTH Ujung sebagai pelaku utama pengelolaan HKm di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Penelitian ini sangat penting dan didasarkan pada perbandingan kinerja kelompok tani hutan sebelum dan sesudah izin pengelolaan kawasan hutan untuk memahami dampak program HKm dan berkontribusi pada pengembangan program HKm yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan variabel-variabel dan indikator yang mempengaruhi kinerja kelompok tani ujung dalam pengelolaan HKm.

2. Mengidentifikasi kinerja kelompok tani ujung dalam pengelolaan HKm.

1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta evaluasi pihak instansi terkait kinerja kelompok tani dalam pengelolaan HKm.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. HKm diberikan kepada kelompok masyarakat setempat dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Keputusan untuk memperoleh IUPHKm diterbitkan oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Objek HKm sebagai fungsi hutan dalam pembahasan ini terdiri dari dua yaitu hutan produksi dan hutan lindung (Firdaus, 2018). Hutan produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat di bidang industri. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan sejalan dengan penanaman kembali dan memastikan produksi kayu berlangsung secara berkelanjutan. Di sisi lain, hutan lindung merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologisnya, terutama terkait tata air serta kesuburan tanah sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak (Sarintan & Tengku, 2021).

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan dan juga pemerintah. Rancangan program HKm oleh pemerintah sebagai langkah preventif atau pencegahan dalam hal degradasi kawasan hutan yang disebabkan oleh aktivitas *illegal logging* oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat merasakan dampak positif yang signifikan sebagai aktor utama dalam implementasi program HKm. Output terpenting dari program ini adalah peningkatan kesejahteraan dan potensi ekonomi masyarakat sebelum dan setelah program HKm diterapkan di wilayah tersebut (Safe'i et al., 2018).

Dampak program HKm dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada kondisi sebelum dan sesudah program HKm (Ayu et al., 2022). Dengan membandingkan kinerja kelompok tani sebelum dan sesudah penetapan skema dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan mengevaluasi efektivitas dari skema pengelolaan dalam meningkatkan kinerja kelompok tani (Windarti, 2018).

Perubahan perilaku masyarakat setelah adanya HKm sangat berdampak positif. Sebelum adanya HKm masyarakat membuka lahan dengan cara membakar dan hanya melakukan budidaya tanaman sayuran. Akan tetapi, Setelah adanya program HKm masyarakat membuka lahan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kegiatan HKm berkembang menjadi usaha budidaya lebah madu, budidaya tanaman hortikultura dan pembibitan tanaman kehutanan (Martapani et al., 2021).

Pengelola Hutan Kemasyarakatan merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang bergabung dalam kelompok atau gabungan kelompok pengelola hutan setempat, yang keanggotaannya diketahui dan ditandatangani oleh lurah/kepala desa (Firdaus, 2018). Pengelolaan HKm dapat berjalan efektif melalui KTH sebagai wadah yang memfasilitasi interaksi dan koordinasi antaranggota. KTH sebagai kelembagaan tingkat petani yang memiliki peran penting dalam mengembangkan unit usaha bersama, memungkinkan pencapaian tujuan bersama dengan lebih efisien. Keberadaan KTH menjadi kerangka bagi anggotanya dalam menjalankan program-program terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan HKm (Safe'i et al., 2018).

2.2 Kelompok Tani Hutan (KTH)

Sektor pertanian menjadi salah satu faktor kunci pendukung ekonomi nasional. Sektor pertanian terdiri dari lima sub sektor yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Kelompok tani merupakan sekelompok petani/peternak/pekebun atau pekerja lainnya dalam sektor pertanian yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya. Tujuan dibentuk kelompok tani adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Pada sub sektor kehutanan, Kelompok tani hutan (KTH) memiliki struktur organisasi kepengurusan yang terdiri dari ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan hutan kemasyarakatan (Alimuna & Srifitriani, 2022).

Kepemimpinan ketua kelompok tani dianggap sangat penting dalam mengkoordinasi setiap anggota melalui pemberian arahan, perencanaan yang matang, dan campur tangan langsung dalam setiap kegiatan kelompok tani. Peran ketua kelompok memberikan arahan dan panduan kepada anggota, memfasilitasi

pencapaian tujuan kelompok, merangsang keaktifan anggota, serta mampu menerima aspirasi dari anggota kelompoknya (Dinar, 2019). Keberhasilan program Hutan Kemasyarakatan sering kali ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang efektif dan berfokus pada pemberdayaan anggota kelompok tani (Rimbawati et al., 2018).

Kelompok tani hutan (KTH) tidak hanya dianggap sebagai anggota masyarakat, tetapi juga menjadi pihak yang memegang peranan sentral dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan di tingkat lokal. KTH bukan hanya menjadi sasaran penyuluhan kehutanan, melainkan juga aktor kunci dalam inisiatif pengembangan hutan (Rimbawati et al., 2018). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.89 tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan menjelaskan bahwa KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.89 tahun 2018 bahwa KTH memiliki fungsi sebagai media:

- a. Pembelajaran masyarakat
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- c. Pemecahan permasalahan
- d. Kerja sama dan gotong-royong
- e. Pengembangan usaha produktif, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- f. Peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dalam Pengelolaan HKm

Kinerja merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian suatu organisasi yang digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu keberhasilan dan kegagalan organisasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan (Astriyani, 2023). Program Hutan Kemasyarakatan (HKm), baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun provinsi, belum sepenuhnya menjadi prioritas, sehingga alokasi anggaran untuk HKm masih terbatas. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dalam implementasi HKm. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan HKm. Tugas pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pemberian izin dan

pengelolaan, tetapi juga meliputi kewajiban untuk memfasilitasi pengembangan HKm di wilayahnya, mulai dari perencanaan, inisiasi, pendampingan, hingga pengusulan pembiayaan (Sanudin et al., 2016).

Demi tercapainya keberhasilan implementasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm), ada tiga faktor utama yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait sesuai dengan peran masing-masing. Faktor-faktor tersebut diantaranya pengembangan kelembagaan kelompok tani, pengelolaan lahan, dan pengembangan kewirausahaan (Sanudin et al., 2016). Keberadaan lembaga pengelolaan yang efektif adalah kunci utama dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan untuk jangka waktu yang panjang. Evaluasi kinerja kelembagaan menjadi penentu utama, dengan mempertimbangkan efektivitas dalam mencapai tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kelangsungan kelembagaan melalui interaksi dengan kelompok kepentingan eksternal. Hubungan sosial antar individu dalam kelompok dianggap sebagai potensi krusial untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan HKm (Rusadi, 2021).

Penyempurnaan implementasi HKm diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat baik dari segi individu maupun organisasi sehingga mereka memiliki kesadaran dan kapasitas untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Selain itu, pendampingan dari LSM, universitas, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya juga diperlukan agar para petani dapat mengimplementasikan HKm dengan baik (Sanudin et al., 2016). Implementasi HKm dapat dinilai dari kinerja KTH. Oleh karena itu, organisasi kelompok tani hutan ini sangat penting dalam pengembangan kegiatan kehutanan. Berikut faktor pendorong pengelolaan HKm (Rusadi, 2021) ;

1. Adanya pendampingan *stakeholder*

Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan memiliki dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan serta berperan dalam mengatasi dan mencegah kerusakan dalam pengelolaan hutan. Tahap pengelolaan yang melibatkan *stakeholder* membentuk matriks pertukaran pengetahuan untuk memberikan kontribusi fungsi fasilitasi dan koordinasi yang saling melengkapi. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses pemantauan global terhadap keadaan hutan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan lahan
Ketersediaan lahan dan metode pengelolaan seperti persiapan lahan, proses pembibitan, pola penanaman dan sistem pemeliharaan mencerminkan kebijakan lokal dalam pengelolaan. Hal ini memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Adanya aturan internal kelompok
Aturan pengelolaan HKm diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan aturan yang disampaikan secara lisan. Struktur kelembagaan yang memiliki AD/ART penting sehingga suatu kesepakatan dan tanggung jawab bersama bertujuan untuk mengembangkan ide-ide yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan kelompok.
4. Terdapat program kerja
Program kerja adalah serangkaian langkah-langkah yang berperan sebagai penunjang untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Rencana kerja KTH melibatkan rincian program kegiatan dan pelaksanaan tugas yang telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan.
5. Terdapat unit usaha HKm (KUPS)
Koperasi mewujudkan produksi berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan mengidentifikasi tantangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing kelompok. Pembentukan KUPS didasarkan pada kesamaan usaha dan jenis komoditi yang dikelola oleh anggotanya. Keberadaan KUPS sebagai unit usaha berperan dalam memasarkan hasil hutan milik anggota KTH sehingga memberikan pengaruh penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dinamika kelompok sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya fungsi tugas; setiap anggota kelompok memiliki tugas yang sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok, Jumlah anggota; semakin luas usulan lahan maka semakin banyak anggota yang dibutuhkan dan jumlah anggota harus seimbang dengan kemampuan pengelolaan lahan dengan mengedepankan asas keadilan (Wijaya et al, 2020). Kinerja kelompok tani diukur dengan berbagai

indikator antara lain dengan adanya kelompok, struktur organisasi kelompok, aturan kelompok (AD/ART), keanggotaan, areal kelola kelompok, dan administrasi kelompok (Akhdiyati & Riyani, 2009).

Faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja KTH sebagai berikut (Gustika et al, 2020):

1. Penguatan organisasi KTH

Anggota kelompok tani bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok sehingga hubungan sesama anggota kelompok menjadi lebih erat. Jumlah kunjungan oleh penyuluh KPH sebagai pembina bisa memperlancar komunikasi, memberikan motivasi dan membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh pengurus dan anggota KTH.

2. Pembinaan KTH

Program pemberdayaan dalam pengembangan sumber daya manusia berupa upaya peningkatan kesadaran terhadap anggota kelompok tani hutan. Anggota kelompok tani memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dengan mempelajari aspek sumberdaya yang dimiliki, aspek modal, pasar, dan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraannya yang menyangkut aspek ekonomi, rohani, dan kesehatan.